

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 1 Januari 2001 di Indonesia mulai diterapkan tatanan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan memberikan penekanan otonomi pada tiap daerah, dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah. Hal ini membuka peluang daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah dalam desentralisasi adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah dan yang potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan untuk dapat membiayai pengeluaran rutin daerah dan meningkatkan perekonomian secara nasional. Halim (2002:25) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan

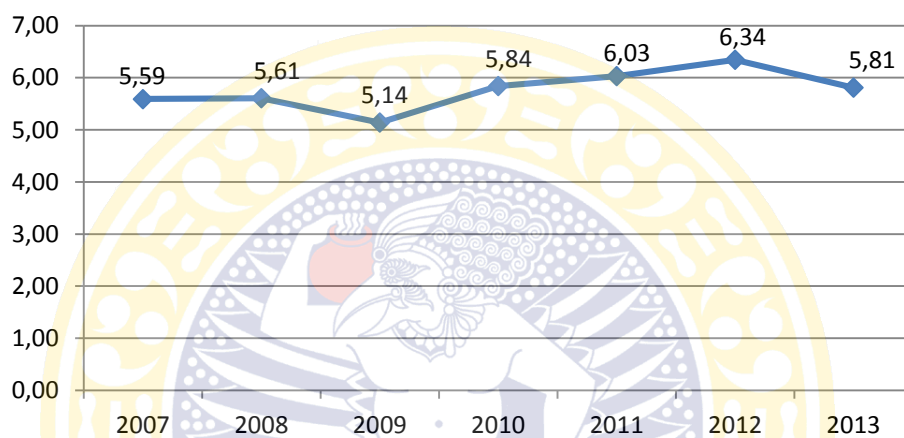
(2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Tetapi terdapat beberapa kelemahan dari penerapan otonomi daerah. Prud'homme dalam Sasana (2009:106) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain:

- a. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
- b. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal
- c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*
- d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km². Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Jawa Tengah terdiri atas 4 kota administratif. Namun sejak otonomi daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota di Kota Semarang. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 573 kecamatan dan 8.574 desa/kelurahan. Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2013 merupakan Provinsi di Indonesia yang tidak mengalami pemekaran kabupaten/kota sehingga terlihat originalitas keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Wilayah Jawa Tengah dapat dikatakan berkembang dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerahnya, namun dalam realitanya masih banyak permasalahan ekonomi di masyarakatnya (Yuanita dan Vita, 2013 : 45).



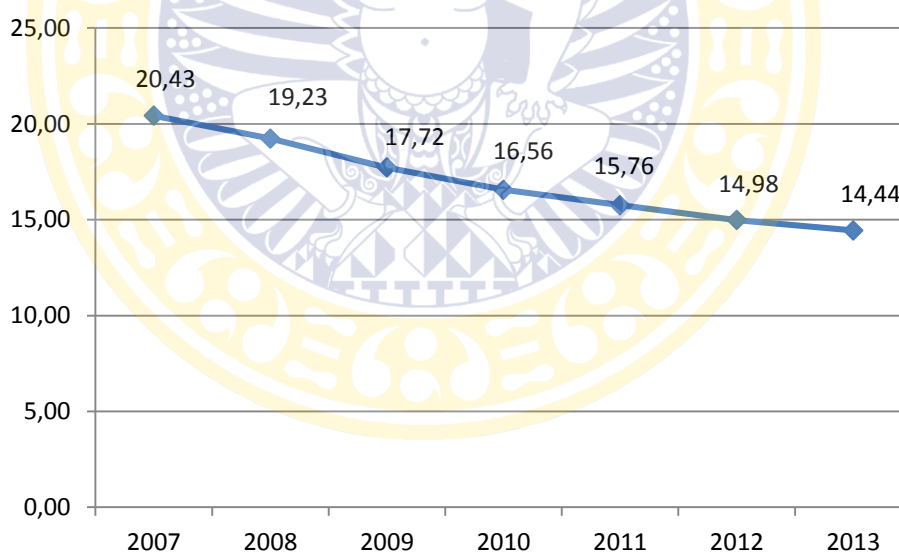
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah

Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan suatu daerah. Pertama, dilihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan *output* akan meningkat dari satu periode ke periode selanjutnya disebabkan oleh faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah selama 2007-2013 menunjukkan kecenderungan selalu meningkat, tetapi belum

mampu memecahkan permasalahan dasar di masing-masing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kedua, dilihat dari aspek kemiskinan. Kemiskinan merupakan inti permasalahan pembangunan. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak (Sasana, 2009:104).

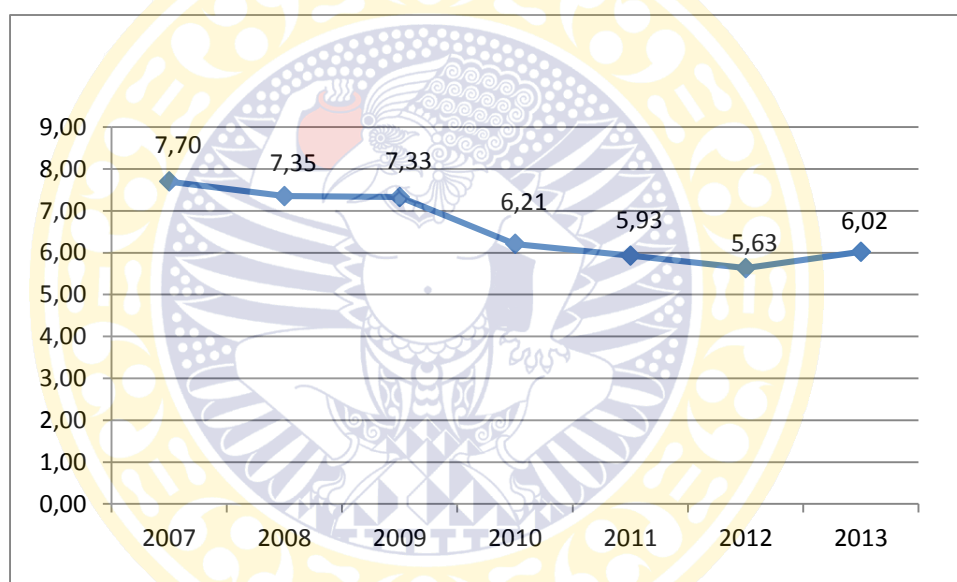


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Grafik 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Ketiga, dilihat dari indikator ketenagakerjaan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berpenduduk kurang

lebih 32.380.687 jiwa yang terdiri atas 6.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan dengan kepadatan populasi 994,9 km², dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduknya rata – rata sebesar 0,67% per tahun. Jumlah penduduk di Jawa Tengah yang besar mengakibatkan persediaan tenaga kerja juga besar. Tenaga kerja yang besar tersebut merupakan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru apabila tidak didukung dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi.

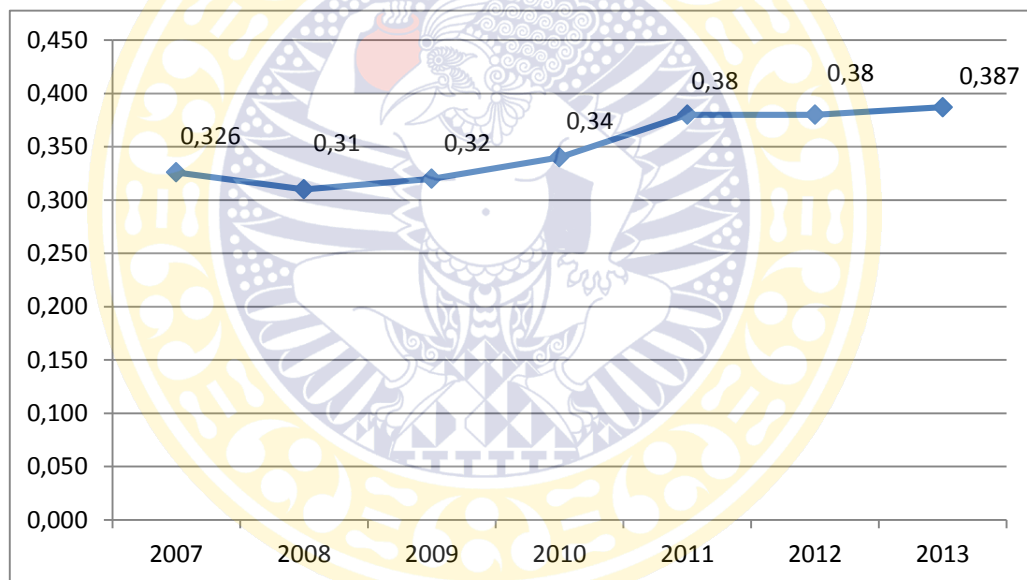


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

Keempat, dilihat dari ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ketimpangan wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun memiliki masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah walaupun dengan ukuran yang berbeda-beda (Lukman dan Ghozali, 2003 : 23). Menurut Todaro

(2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Tengah tingkat ketimpangan yang terjadi relatif tinggi dan tiap tahun menunjukkan ketimpangan yang relatif meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Gambar 1.4 Tingkat Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah

Pada realitanya, empat indikator perekonomian yang disebutkan sebelumnya terjadi perbedaan di tiap kabupaten / kota Jawa Tengah. Perbedaan ini berhubungan dengan potensi serta sumberdaya yang terdapat di daerah otonom, dimana karakteristik masing – masing daerah mempengaruhi potensi serta sumber

daya yang terdapat di dalamnya. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya perbedaan kemampuan pada masing – masing daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah kritis di Indonesia. Ketiganya merupakan tantangan nyata dalam pembangunan (Fadly, 2011:10). Menurut Todaro (2004) tujuan utama pembangunan bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya saja, melainkan juga pertumbuhan ekonomi yang mampu mengentaskan kemiskinan, menanggulangi ketimpangan distribusi pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akan mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pendapatan secara bersama sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan secara bersama – sama dan parsial berpengaruh terhadap ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharap dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tentang penerapan desentralisasi fiskal terutama sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah,

pengurangan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku pembuat kebijakan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini merupakan landasan awal dari penelitian yang dilakukan pada seluruh variabel. Pada bab satu juga disampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Pada bab dua terdapat uraian lebih mendalam tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Berbagai sumber dari literatur yang berkaitan dengan variabel atau permasalahan digunakan sebagai dasar penulisan. Selain itu pada bab dua juga dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulisan berikut. Dalam bab ini juga berisi hipotesis dan model analisis.

BAB 3: Metodologi Penelitian

Pada bab tiga dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, indentifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Bab empat merupakan inti dari penelitian yang dilakukan di mana disampaikan gambaran umum seluruh variabel, analisis model, dan pembahasan.

BAB 5: Kesimpulan dan Saran

Pada bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

